



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutana

RENCANA KERJA 2018

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

No: P.13/PHLHK/SET/SET.1/10/2017

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK.Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, diamanatkan bahwa Rencana Strategi Seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/PHLHK-SETDIT/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, diamanatkan bahwa Rencana Kerja Tahunan Seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3277;)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6125)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menlhk-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.40/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 211);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.72/MenLHK-Setjen/Rokum.1/8/2016 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1313);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.78/MenLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1958);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.51/MenLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.52/MenLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1508);
26. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P- 4/PHLHK-SETDIT/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja unit kerja Eselon II dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018;

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 27 Oktober 2017



DIREKTUR JENDERAL

Rasio Ridho Sani

NIP. 19660711 199203 1 018

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.13/PHLHK/SET/SET.1/10/2017
TANGGAL : 27 Oktober 2017

TENTANG
RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018



DAFTAR ISI

Daftar Isi		Hal
Daftar Lampiran		i
Kata Pengantar		ii
		iv
BAB I	Pendahuluan	
	A Latar Belakang	2
	B Kondisi Umum	4
	C Kondisi Khusus	4
	D Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
	E Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	7
	F Data Terpilah Sumber Daya Manusia GAKKUM LHK	9
BAB II	Capaian Kinerja Tahun 2016 Dan Prognosis Tahun 2017	
	A Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016	18
	B Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017	20
	C Capaian Serapan Anggaran Tahun 2016	22
	D Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017	23
	E Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2017	24
BAB III	Rencana Kerja Tahun 2018	
	A Pembuka Wawasan	26
	B Komitmen Penegakan Hukum	31
	C Instrumen Hukum	31
	D Rencana Kerja Pemerintah	32
	E Program dan Kegiatan Tahun 2018	35
BAB IV	Penutup	41
BAB V	Lampiran	42



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Keterangan	Hal
Gambar Tipologi Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.
Gambar Struktur Organisasi Ditjen GAKKUM LHK (s/d Eselon II)	5.
Matriks Data Terpilah SDM di 10 (Sepuluh) Satker GAKKUM LHK	6.
Infografis Sebaran SDM (SPORC, POLHUT, PPNS dan PPLH) di di 5 (Lima) UPT GAKKUM LHK per september 2017	9.
Data Terpilah SPORC GAKKUM LHK	12
Data Terpilah PPLH GAKKUM LHK	14
Data Terpilah PPNS GAKKUM LHK	16
Matrik Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016	19
Tabel Prognosis Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2017	20
Tabel Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2017	21
Matrik Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2016 per Bulan	22
Matrik Prognosis Reailsasi Anggaran Tahun 2017 per bulan	23
Tabel Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2017	24
Gambar Komitmen Kepemerintahan Jokowi terkait Penanganan Penegakan Hukum LHK;	26
Infografis Arahan Presiden Joko Widodo terkait KARHUTLA	27
Skema Prioritas Nasional POLHUHANKAM	33
Rancangan Program Prioritas : Kepastian Hukum	33
Infografis Indikator Kinerja Utama : KLHK	34
Matrik IKU terkait GAKKUM LHK	34
Matrik IKP GAKKUM LHK	35
Matriks Penanggungjawab Kegiatan lingkup Ditjen GAKKUM LHK	35
Matrik IKK GAKKUM LHK	36
Matrik Proyek Prioritas Nasional GAKKUM LHK	37
Matrik Anggaran Proyek Prioritas Nasional GAKKUM LHK	37
Matrik IKK: PPH	38
Matrik IKK: PSLH	38
Matrik IKK: PPSA	39
Matrik Kinerja Kegiatan : PHP LHK	40
Matrik Kinerja Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan teknis Unit lainnya	40

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan	Hal
1	Infografis : Rencana Locus Kegiatan PPH	43.
2	Infografis : Rencana Locus Unit Kegiatan Penanganan Pengaduan LHK	44.
3	Infografis : Rencana Locus Unit Kegiatan Pengawasan Perizinan PUU LH	45.
4	Infografis : Rencana Locus Unit Kegiatan Sanksi Administrasi	46.
5	Infografis : Rencana Locus Kegiatan PSLH	47.
6	Infografis : Rencana Locus Kegiatan PHP LHK	48.
7	Tabel Rincian Anggaran Belanja TA 2018 Per Program dan Per Kegiatan – GAKKUM LHK	49.
8	Tabel Rincian Anggaran Belanja TA 2018 per Satker – GAKKUM LHK	50.
9.	Rekapitulasi Kegiatan Ditjen PHLHK TA 2018	51.
10	Rekapitulasi Kegiatan Ditjen PHLHK TA 2018 – RKP 2018	55.
11	Matriks Target, Anggaran Program PHLHK	63.
12	Matriks Target, Anggaran Kegiatan PPH	66.
13	Matriks Target, Anggaran Kegiatan PSLH	67.
14	Matriks Target, Anggaran Kegiatan PPSA	68.
15	Matriks Target, Anggaran Kegiatan PHP LHK	69.
16	Matriks Target, Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Liannya	70.
17	Matriks Target, Anggaran Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Sumatera	71.
18	Matriks Target, Anggaran Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	72.
19	Matriks Target, Anggaran Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Kalimantan	73.
20	Matriks Target, Anggaran Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Sulawesi	74.
21	Matriks Target, Anggaran Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Maluku Papua	75.



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirancang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2018, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, dan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2018 ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran Ditjen, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan dan masyarakat luas.

Jakarta, 27 Oktober 2017

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Rasio Ridho Sani



TATA KELOLA, TANTANGAN DAN PELUANG GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kehadiran Gakkum LHK diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menjamin ketersediaan sumber daya produksi untuk menyejahterakan rakyat secara berkelanjutan.

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK) Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan tahunan keempat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP Tahun 2018. Penyusunan Renja GAKKUM LHK Tahun 2018 dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Awal RKP yang di dalamnya mencakup Proyek Prioritas Nasional lingkup GAKKUM LHK. Proyek Prioritas Nasional lingkup GAKKUM LHK merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2018. Rencana Kerja GAKKUM LHK memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh GAKKUM LHK, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penjelasan Umum Rencana Kerja GAKKUM LHK ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh GAKKUM LHK terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia. Bagi GAKKUM LHK yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2018, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Berikut ini 6 (Enam) Isu Utama Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

1. Alokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi (tata perizinan, hutan sosial, reforma agraria, pangan, energi, ketahanan air dan sumber penopang pusat pertumbuhan wilayah)
2. Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan (illegal logging, karhutla, peti, tata perizinan, law enforcement, pemulihan lingkungan)
3. Konservasi dan pemeliharaan bio-diversity dan biosfer (peningkatan dan penanganan tumbuhan dan satwa langka/TSL, serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas udara, air dan tanah/bentang alam)
4. Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan (peningkatan usaha produksi kayu, hasil hutan non kayu, ekowisata/jasa lingkungan lainnya, daur ulang/circular economy, serta peningkatan manajemen usaha rakyat)
5. Pengendalian kejahatan lingkungan (penataan regulasi, penertiban pengawasan perizinan dan penegakan hukum)
6. Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan dan sumberdaya sampah/limbah dan dalam pengawasan sosial perizinan dan pengendalian lingkungan serta dalam mendorong law enforcement.



**KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGHENTIAN SEMENTARA SELURUH KEGIATAN
BERDASARKAN
SK. 4053/Menlhk- PHLHK/PPSA/GKM.0/7/2017**

(KACAMAN PERUMAHAN & TRUKU PENYARA DAN DENGAN 1 MEYER SUPPLY RISAL 134 UU NOMOR 22 TAHUN
2002 TENTANG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

B. Kondisi Umum

Lingkup kondisi yang dimaksud dalam hal ini adalah selain kondisi institutive juga kondisi substantif. Adapun kondisi *institutive* secara generik meliputi perihal manajemen, administrasi, dan organisasi. Sedangkan kondisi substantive meliputi substansi yang relevan dengan bidang tugas dan fungsi GAKKUM LHK, seperti misalnya kondisi lingkungan hidup dan hutan serta kondisi kesehatan ekologis dan kondisi keberfungsian ekosistem yang dapat berubah oleh keberhasilan upaya GAKKUM LHK, yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Keberhasilan termasuk di atas merupakan dampak dan/atau manfaat dari keluaran dari kegiatan penegakan hukum oleh GAKKUM LHK, yang secara garis besar meliputi:

- Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
- Peningkatan layanan penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dan kehutanan;
- Peningkatan ketaatan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup;
- Pencegahan dan pengamanan asset hutan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian LHK;
- Penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan;

C. Kondisi Khusus



Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan GAKKUM LHK dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memeberikan terobosan terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum yang akan digunakan antara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, penerapan multi instrumen hukum, penerapan multi rejim hukum (*Multidoors*), dan penerapan kebijakan simbolik.

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai berikut:



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), diberikan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

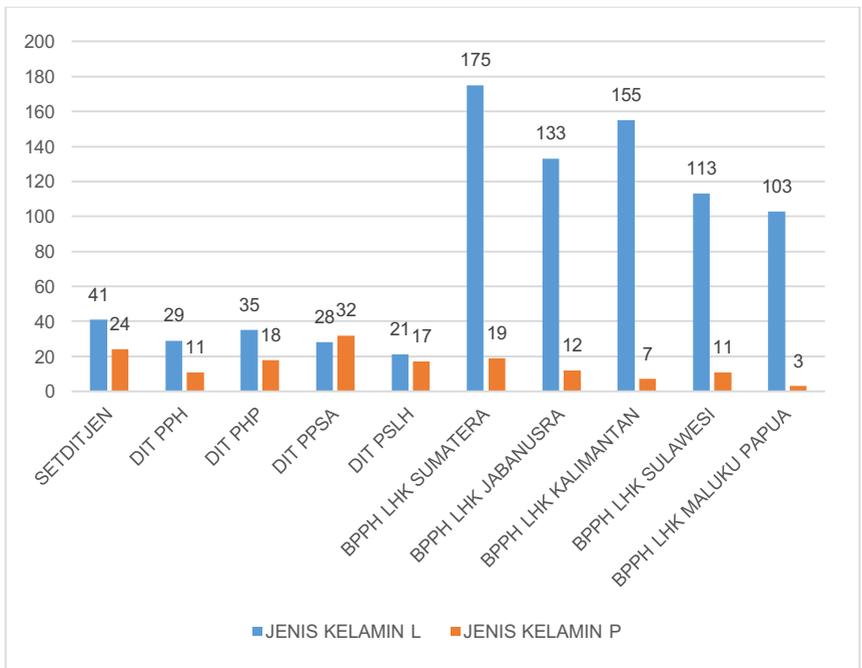
Selanjutnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berfungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi GAKKUM LHK;

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sumber daya yang dialokasi pada Ditjen GAKKUM LHK masih sangat terbatas, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan dan sarana. Adapun komposisi sumber daya tersebut sampai dengan September 2017 sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini memiliki 987 pegawai pria dan wanita yang tersebar di 10 Satuan Kerja, seperti gambar di bawah ini:



E. Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal GAKKUM LHK dan harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh Satuan Kerja/Unit Kegiatan Eselon II sudah responsif gender.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: **akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat** yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisa. PUG telah menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pada Buku II Bab I.

Didalam RPJMN telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan yang responsif gender. Pelaksanaan PPRG telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010. Terakhir, ketentuan mengenai PPRG diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.02/2012 mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, di mana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan. Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Kementerian/Lembaga dan menjadi acuan untuk Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



GEDUNG PENAMPUNGAN SEMENTARA LIMBAH B3
S : 06 . 06 . 611 - E : 106 . 47 . 285



PATUHI PERATURAN DI DALAM AREA :

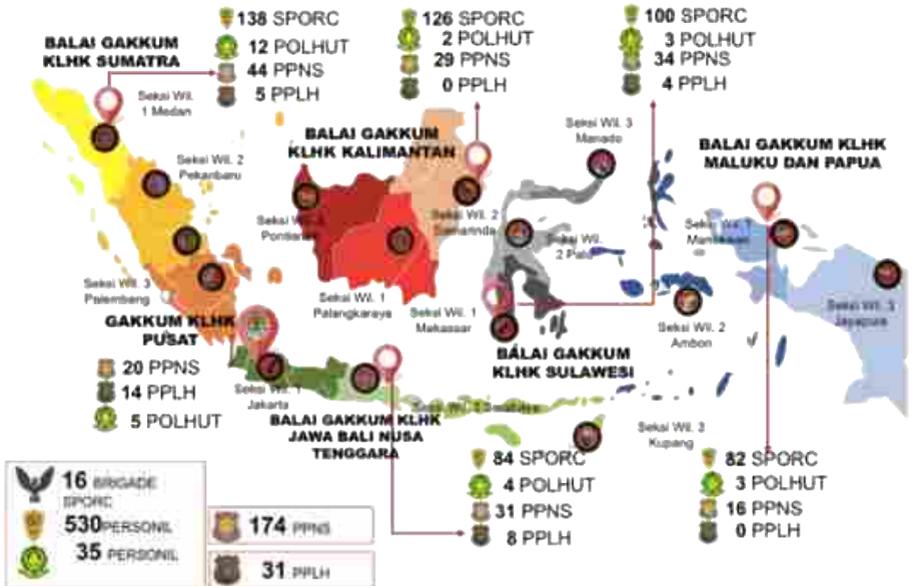


F. Data Terpilah Sumber Daya Manusia GAKKUM LHK

Sampai dengan bulan September 2017, Jumlah seluruh pegawai Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK sebanyak 987 Pegawai, dengan komposisi pegawai menurut Jenis Kelamin di dominasi oleh Laki-Laki sebanyak 833 Pegawai (84%) dan Perempuan sebanyak 154 (16%);

Jumlah pegawai di 10 Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang jumlahnya tinggi didominasi pegawai Laki-Laki adalah di 5 (Lima) Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sumatera, Jabalnusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;

Dari jumlah seluruh pegawai Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK sebanyak 987 Pegawai, dengan komposisi pegawai menurut Tingkat Pendidikan di dominasi oleh SMU sebanyak 520 Pegawai (52,88%) di ikuti Pegawai dengan Tingkat Pendidikan S1 sebanyak 340 Pegawai (34,45%).



Dari 520 Pegawai dengan tingkat pendidikan SMU tersebar mayoritas di 5 (Lima) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Sumatera sebanyak 128 Pegawai, di Jawa Bali Nusa Tenggara sebanyak 79 Orang, di Kalimantan sebanyak 103 Orang, di Sulawesi sebanyak 77 Orang dan di Maluku Papua sebanyak 83 Orang;

Dari jumlah seluruh pegawai Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK sebanyak 987 Pegawai, dengan komposisi pegawai menurut Tingkat Usia di dominasi Usia 41-50 Tahun 485 Pegawai dan untuk Usia di atas 50 Tahun sebanyak 109 Pegawai.

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebanyak 535 berstatus SPORC dan 29 Polisi Kehutanan, dengan Komposisi 553 Polisi Hutan Pria dan 11 Polisi Hutan Wanita, di lihat dari Status Pendidikan 322 Orang Setingkat SMU, 90 Orang D3, 143 Orang S1 dan 9 Orang S2, di lihat dari Usia 20 s/d 30 Orang sebanyak 5 Orang, 31 s/d 40 sebanyak 160 Orang, 41 s/d 50 sebanyak 338 Orang, diatas 50 Tahun sebanyak 61 Orang.

Jabatan Fungsional PPLH sebanyak 31 Orang dengan Komposisi 23 Orang PPLH Pria dan 8 Orang PPLH Wanita dengan status Pendidikan S1 sebanyak 21 Orang dan S2 sebanyak 10 Orang dengan Usia 31 s/d 40 sebanyak 5 Orang, 41 s/d 50 sebanyak 9 Orang, dan diatas 50 orang sebanyak 17 Orang;

Untuk PNS yang Berstatus Penyidik (PPNS) dengan Total 174 Orang terdiri dari 171 Orang PPNS Pria, dan 3 Orang PPNS Wanita dengan tingkat Pendidikan SMA sebanyak 17 Orang, D3 sebanyak 26, S1 sebanyak 100 Orang, dan S2 sebanyak 31 Orang, dengan range usia 31 s/d 40 tahun sebanyak 28 Orang, 41 s/d 50 tahun sebanyak 121 Orang dan diatas 50 Tahun sebanyak 25 Orang.



a. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan (SPORC)

Data Terpilah jabatan fungsional Polisi Kehutanan (SPORC) dan wilayah kerja sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan



Gambar diatas memaparkan data terpilah polisi kehutanan (SPORC) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Jenis Kelamin, Range Usia, Tingkat Pendidikan, dan penyebarannya di Satuan Kerja lingkup Ditjen GAKKUM KLHK.

Dari Jumlah Total 564 Orang tercatat hingga September 2017 terdiri dari 553 Orang Pria dan 11 Orang Wanita, dengan Tingkat Pendidikan sebanyak 322 Orang setingkat SMU, 90 Orang D3, dan 143 Orang Strata-1;

Di Satuan Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK terdapat 3 Orang, di Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan terdapat 2 Orang, Jumlah Polisi Kehutanan di BPPH LHK Sumatera sebanyak 150 Orang, BPPH LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebanyak 88 Orang, di BPPH LHK Kalimantan Sebanyak 127 Orang dan di BPPH LHK Sulawesi sebanyak 103 Orang, untuk Polisi Kehutanan di BPPH LHK Maluku Papua sebanyak 91 Orang.

Dilihat dari Range Usia, sebanyak 5 Orang di Range Usia 20 s/d 30 Tahun, sebanyak 31 s/d 40 tahun sebanyak 160 Orang, ada 338 Orang di range usia 41 s/d 50 Tahun, dan 61 Orang di atas usia 50 Tahun.



b. Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

Data Terpilah jabatan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan wilayah kerja sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan



Gambar diatas memaparkan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Jenis Kelamin, Range Usia, Tingkat Pendidikan, dan penyebarannya di Satuan Kerja.

Dari Jumlah Total 31 Orang tercatat hingga September 2017 terdiri dari 23 Orang Pria dan 8 Orang Wanita, dengan Tingkat Pendidikan sebanyak 21 Orang Strata-1, dan 10 Orang Strata-2;

Di Satuan Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi terdapat 14 Orang, PPLH di BPPH LHK Sumatera sebanyak 5 Orang, BPPH LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebanyak 8 Orang, belum ada PPLH di BPPH LHK Kalimantan, di BPPH LHK Sulawesi sebanyak 4 Orang, dan belum ada PPLH di BPPH LHK Maluku Papua

Dilihat dari Range Usia, sebanyak 31 s/d 40 tahun sebanyak 5 Orang, ada 9 Orang di range usia 41 s/d 50 Tahun, dan 17 Orang di atas usia 50 Tahun.

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DILARANG
MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI DALAM RI
KAWALAN DALAM PROSES PERMILIKAN TRADISIONAL
LINGKUNGAN HIDUP
(PERMILIKAN PASAL 201 HUKUM LINGKUNGAN
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA)

PANGAMAN HURUMAN & TAMAN REKREASI & DESMA 3 MIL

Undang-undang dengan kekuatan hukum, yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang
dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap
diundangkan di Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012

c. Pegawai Negeri Sipil berstatus Penyidik (PPNS)

Data Terpilah jabatan Pegawai Negeri Sipil berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPLH) dan wilayah kerja sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan



Gambar diatas memaparkan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Jenis Kelamin, Range Usia, Tingkat Pendidikan, dan penyebarannya di Satuan Kerja.

Dari Jumlah Total 174 Orang tercatat hingga September 2017 terdiri dari 171 Orang Pria dan 3 Orang Wanita, dengan Tingkat Pendidikan sebanyak 17 Orang setingkat SMU, 26 Orang D3, 100 Orang Strata-1, dan 32 Orang Strata-2;

Di Satuan Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK terdapat 20 Orang, PPLH di BPPH LHK Sumatera sebanyak 44 Orang, BPPH LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebanyak 31 Orang, di PPLH di BPPH LHK Kalimantan sebanyak 29 Orang, di BPPH LHK Sulawesi sebanyak 34 Orang, dan 16 Orang PPNS di BPPH LHK Maluku Papua

Dilihat dari Range Usia PPNS, sebanyak 31 s/d 40 tahun sebanyak 28 Orang, ada 121 Orang di range usia 41 s/d 50 Tahun, dan 25 Orang di atas usia 50 Tahun.



BAB II.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK pada Tahun 2016 telah memenuhi melebihi target pada Perjanjian Kinerja 2016 dengan rerata sebesar 199 %. Pelaksanaan peningkatan penataan perusahaan terhadap peraturan perundangan telah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 12.68 % atau pada tahun 2016 sebanyak 95 perusahaan telah masuk kategori taat. Pelaksanaan pencegahan dan pengamanan hutan dalam meningkatkan kawasan hutan yang diamankan dari gangguan telah dilaksanakan pada 5.503.843 Ha. Pelaksanaan pemulihan kawasan hutan yang dilaksanakan masih parsial dan bertahap berimplikasi pada kondisi lapangan yang tidak kondusif dan komitmen kepastian penindakan hukum yang masih mengikuti situasi dan kondisi politik daerah. Gugatan terhadap sengketa lingkungan hidup dari tahun ke tahun selalu meningkat dan selama tahun 2016 telah berhasil menyelesaikan 10 gugatan perdata ke Pengadilan dengan nilai gugatan sekitar Rp. 26 Triliun dan 10 kasus tersebut sebagaimana besar dimenangkan oleh KLHK. Saat ini masih terdapat 4 kasus yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan akan menjalani proses persidangan Tahun 2017. Secara umum penyelesaian kasus pidana LHK telah melampaui target sebanyak 150 kasus.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dan rencana kerja tahun 2017, maka Direktorat Jenderal Penegakan Hukum akan melaksanakan terobosan-terobosan yang dapat mempercepat dana tau mengurangi berbagai hambatan dan tantangan yang ada, antara lain berupa :

1. Pembangunan sistem E Monitoring dan Operasional Room yang akan menjadi pusat kendali pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Membuka ruang rekrutment baru untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia, baik melalui perbaikan aturan hukum dasar rekrutment, perekrutan pegawai-pegawai PPLH dari daerah, dan serta merekrut tenaga baru dari sekolah kedinasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Guna meningkatkan kapasitas SDM internal dan eksternal maka Direktorat Jenderal penegakan hukum akan melaksanakan kerjasama dengan universitas negeri yang ada pada UPT Ditjen PHLHK.
4. Membangun kelembagaan Gakkum LHK untuk wilayah-wilayah yang masih jauh dari kantor Balai dan atau Seksi dengan pola POS Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutana



MATRIKS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 DITJEN GAKKUM LHK

PROGRAM/ KEGIATAN	2016		
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN
DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		246,999,918	202,696,153,
PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
Persentase Pananganan Kasus Pengaduan, Penyelesaian Sengketa, Dan Penegakan Hukum Meningkatkan Setiap Tahun			
Luas Hutan Yang Dapat Di Pertahankan Dari Gangguan Keamanan Hutan Meningkatkan Tiap Tahun		5,000,000	5,503,843
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik		72	76
Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan			
Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 lokasi utamanya di 15 DAS prioritas		18 Lokasi	26 Lokasi
Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		2500 Orang	448 Orang
Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina		10 Unit MMP	17 Unit MMP
Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum		11 Brigade	11 Brigade
Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun		5,000,000	5,503,843
<i>Tersedianya regulasi penanganan pengaduan dan sertifikasi penegakan hukum</i>		20%	20%
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			
Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan		10 Gugatan	100% (10 Gugatan)
Persentase PSLH di luar pengadilan		75%	98,14% (53 Perkara)
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi			
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		500 Pengaduan	136% (564 Pengaduan)
Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		100% dari 500 Izin	199 % (597 Izin)
Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun		70%	108% (76 Unit)
Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum		20 PPLH	65% (13 PPLH)
Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		150 PPLH	200% (300 PPLH)
Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21		75%	105,81% (150 Kasus)
Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan		200 Kasus	108% (208 Kasus)
Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani		100 Persen	100%
Jumlah pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH		20%	85,7 % (6 Kasus)
Fasilitasi penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu		100% (30 Kasus)	150% (45 Kasus)
Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		400 Orang	59,5% (238 Orang)

B. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2017 masih dalam proses pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan hingga 31 Desember 2017.

Berikut merupakan tabel realisasi hingga bulan September tahun 2017 dan Prognosis Capaian Indikator Kinerja Per masing Masing Kegiatan (M.A.K) sebagai berikut:

MATRIKS PROGNOSES TARGET DAN ANGGARAN TAHUN 2017

No	M.A.K IKP/IKK	TARGET 2017	REALISASI s.d 31 September 2017	PROGNOSIS CAPAIAN
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
1	5427.001	74 Poin	null	75
Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan				
2	5428.001	4.000.000 Hektar (34 Provinsi)	4.485.585,97	4.500.000
	5428.002	1500 Orang	1000 Orang	1500 Orang
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				
3	5429.001	10 Gugatan	6 Gugatan	10 Gugatan
	5429.002	75%	9 Perkara	10 Perkara
Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				
4	5430.001	100% dari 500 Pengaduan	416 Pengaduan	500 Pengaduan
	5430.002	60% dari 500 Izin	721 izin	800 Izin
	5430.003	70% dari 100 Sanksi Administrasi	88 Sanksi Administrasi	90 Sanksi Administrasi
	5430.004	50 PPLH	35 PPLH	50 PPLH
Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
5	5431.001	50% dari 150 Kasus	70 Kasus P-21	75 Kasus
	5431.002	300 Orang	280 Orang	300 Orang

MATRIKS PROGNOSIS KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017

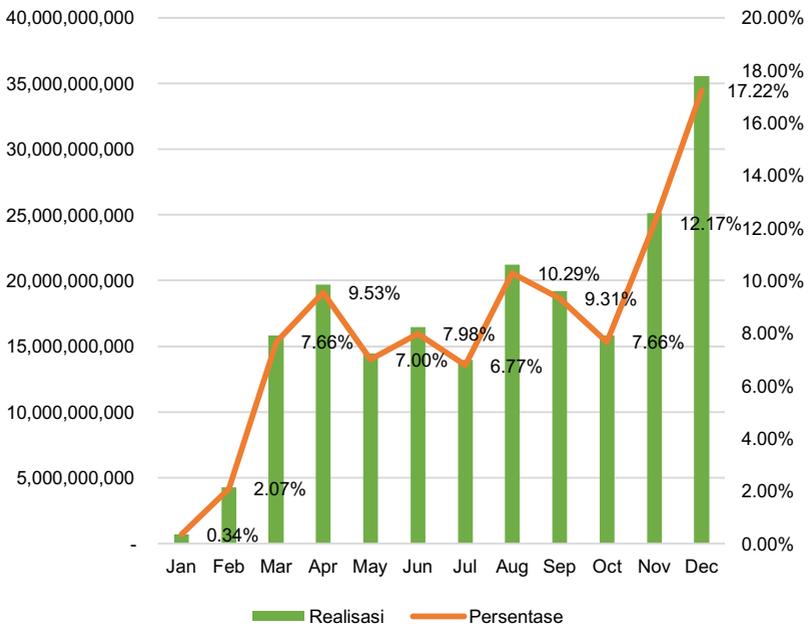
PROGRAM/ KEGIATAN	2016		
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN
DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		246,999,918	202,696,153,
PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
Persentase Pananganan Kasus Pengaduan, Penyelesaian Sengketa, Dan Penegakan Hukum Meningkatkan Setiap Tahun			
Luas Hutan Yang Dapat Di Pertahankan Dari Gangguan Keamanan Hutan Meningkatkan Tiap Tahun		5,000,000	5,503,843
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik		72	76
Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan			
Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 lokasi utamanya di 15 DAS prioritas		18 Lokasi	26 Lokasi
Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		2500 Orang	448 Orang
Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina		10 Unit MMP	17 Unit MMP
Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum		11 Brigade	11 Brigade
Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun		5,000,000	5,503,843
<i>Tersedianya regulasi penanganan pengaduan dan sertifikasi penegakan hukum</i>		20%	20%
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			
Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan		10 Gugatan	100% (10 Gugatan)
Persentase PSLH di luar pengadilan		75%	98,14% (53 Perkara)
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi			
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		500 Pengaduan	136% (564 Pengaduan)
Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		100% dari 500 Izin	199 % (597 Izin)
Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun		70%	108% (76 Unit)
Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum		20 PPLH	65% (13 PPLH)
Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		150 PPLH	200% (300 PPLH)
Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21		75%	105,81%
Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan		200 Kasus	208 Kasus
Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani		100 Persen	100%
Jumlah pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH		20%	85,7 % (6 Kasus)
Fasilitasi penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu		100% (30 Kasus)	150% (45 Kasus)
Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		400 Orang	59,5% (238 Orang)

C. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2016

Pencapaian anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Tahun 2016 adalah merealisasikan sebesar Rp.202.696.153.176,- atau 98%++ dari pagu sebesar 206.461.762.000,-. Penyerapan anggaran kegiatan yang cukup tinggi sebesar 98.18% telah menggambarkan efektifitas pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Penggunaan anggaran tersebut sejalan dengan capaian kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

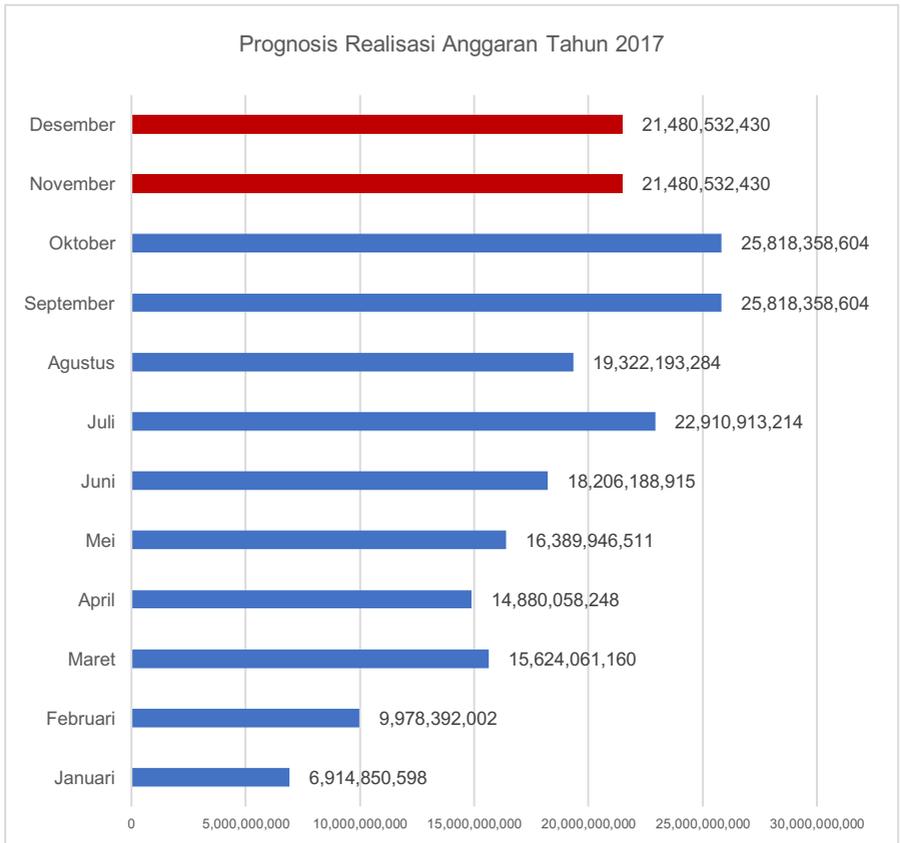
Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2016 telah memenuhi melebihi target pada Perjanjian Kinerja 2016 dengan rerata sebesar 199 %. Pencapaian anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Tahun 2016 adalah merealisasikan sebesar Rp.202.696.153.176,- atau 98,18% dari pagu sebesar 206.461.762.000,-.

Penyerapan anggaran kegiatan yang cukup tinggi sebesar 98.18% telah menggambarkan efektifitas pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Penggunaan anggaran tersebut sejalan dengan capaian kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Rencana Realisasi Pencapaian anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 215,542,020,210 atau 99%++ dari pagu sebesar Rp. 218,824,386,000,-.

Prognosis yang di gunakan dengan analisis peramalan (*forecasting*) menggunakan trend capaian anggaran perbulan dari tahun-tahun sebelumnya, untuk menentukan capaian Penyerapan anggaran kegiatan sebesar 98.18% di tahun 2017 memerlukan komitmen dari masing masing satuan kerja lingkup Ditjen GAKKUM KLHK, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.



E. Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2017

Data Capaian s/d Oktober 2017 = Rp **146,234,499,275,-** (66,8%) dan untuk 2 (dua) bulan kedepan batas terendah rata rata tertimbang realisasi anggaran per bulan yang harus di capai oleh Ditjen GAKKUM KLHK di TA 2017 yaitu 21,49 Miliar per bulan. Maka diperlukan Monitoring dan Evaluasi bila dalam 2 bulan++ tersisa tidak sampai pada sasaran, untuk meningkatkan komitmen satuan kerja untuk dapat efektif dan efisien merealisasikan anggaran yang tersisa di tahun anggaran 2017. Hingga 23 Oktober 2017 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merealisasikan sebesar 70,15% sebesar Rp. 153.515.684.902.

Untuk sisa 65.308.701.098,- (29,95%) akan berjalan realisasi nya hingga 31 Desember 2017. Realisasi hingga 23 Oktober 2017 sebagai berikut: Setditjen Gakkum Lhk (78,95%) Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lhk Wilayah Sumatera (71,45%) Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lhk Wilayah Kalimantan (71,20) Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lhk Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (70,35) Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lhk Wilayah Sulawesi (70,19) Direktorat Pengawasan, Pengaduan Dan Sanksi Administrasi (68,81%) Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lhk Wilayah Maluku Papua (64,72%) Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (**64,29**) Direktorat Pencegahan Dan Pengamanan Hutan (**59,97**) Direktorat Penegakan Hukum Pidana (58,42%).

PAGU ANGGARAN	PROGNOSIS REALISASI
Januari	6,914,850,598
Februari	9,978,392,002
Maret	15,624,061,160
April	14,880,058,248
Mei	16,389,946,511
Juni	18,206,188,915
Juli	22,910,913,214
Agustus	19,322,193,284
September	25,818,358,604
Oktober	25,818,358,604
November	21,480,532,430
Desember	21,480,532,430
Total	218,824,386,000

GAKKUM DALAM GAMBAR



BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2018

A. Pembuka Wawasan

Tiga isu penting dalam Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode sekarang ini adalah **Tata Kelola, Akses Informasi, dan Keadilan**. Dengan demikian maka peran penegakan hukum menjadi prioritas untuk ditingkatkan **kapasitas** dan **kinerjanya**.

“Ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan penegakan hukum kehutanan”

Pemerintah memiliki komitmen yang kuat terkait dengan penanganan GAKKUM KLHK

Pasal 28 H ayat (1) UUD RI 1945

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”

Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”



“Tindak tegas para pelaku illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing”

(Presiden Joko Widodo, Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2015)

- Kegiatan pengawasan, dalam rangka penegakan hukum diharapkan tidak hanya bersifat eksekutif, namun juga bersifat yudikatif, dan perlu harmoni yang kuat antara pelaksanaan dan pengendalian.
- Agar masyarakat dapat membantu Kementerian LHK dalam pengawasan maka **akses informasi bagi masyarakat** menjadi penting untuk ditingkatkan, terutama informasi mengenai perizinan.
- Monitoring dan evaluasi izin-izin usaha dan kasus kejahatan lingkungan harus lebih ditingkatkan kinerjanya.
- **Tiga pilar utama dalam mekanisme penegakan hukum** adalah pembuat kebijakan, pelaku kebijakan, dan penegak hukum. Dalam konteks ini Kementerian LHK memiliki mandat dari Undang Undang Nomor 32 tahun 2009,



terutama pasal-pasal yang berkenaan dengan penegakan hukum. Persoalannya adalah bagaimana agar Kementerian LHK berhasil meyakinkan kementerian lain akan pentingnya penegakan hukum yang dimandatkan UU tersebut di atas. Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semestinya memiliki **strong leadership** yang didukung oleh **manajemen yang solid**, dan berorientasi pada **sustainable development**.

- **Penegakan perangkat legal dan regulasi** harus tetap dilaksanakan karena hutan dan lahan tidak hanya perlu di jaga tetapi juga dimanfaatkan. Juga perlu adanya lebih kejelasan tentang batas kawasan hutan dan lahan karena kawasan tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak, sehingga terdapat kepastian juga bagi penegakan hukumnya.
- **Kebakaran hutan dan lahan** pada tahun 2015 mengalami puncaknya dan mengalami penurunan di tahun 2016, dan 2017 namun kejadian yang berulang tiap tahun dengan luas dan sebaran asap signifikan mempengaruhi kejahatan dan transportasi, terutama di pulau Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan tersebut telah menimbulkan kerugian yang signifikan pada hajat hidup orang banyak. Demikian juga anggaran belanja negara yang cukup besar telah terpakai untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016

Istana Negara, 18 Januari 2016





PENCEGAHAN & EARLY WARNING

- * Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim, sampai ke Koramil dan Kapolsek, semuanya harus bergerak untuk mencegah. Jangan dibiarkan api satu bergerak.
- * BNPB dan Pemerintah daerah back up TNI dan Polri



REWARD AND PUNISHMENT

Pejabat yang lahan di daerahnya terbakar semakin banyak & besar akan diganti, sementara pejabat yang daerahnya baik dan tidak ada kebakaran lahan akan dipromosikan.
Itu janji saya dengan Panglima TNI dan Kapolri.



PERBAIKAN & PENATAAN EKOSISTEM

- * Tidak boleh ada izin baru di area gambut.
- * Kementerian LHK ambil alih area gambut yang terbakar.
- * Badan Restorasi Gambut segera membuat rencana aksi di lahan-lahan tersebut.



TINJAU KE LAPANGAN

Jangan hanya memantau dari belakang meja, lihat dan turun ke lapangan.



PENEGAKAN HUKUM

Lakukan langkah tegas pada pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, pidana, maupun perdata.



SINERGI PUSAT DAN DAERAH

Kuatkan sinergi antar instansi pemerintah dan hilangkan egosektoral sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif.

"Secara berkala saya akan meninjau ke lapangan untuk memastikan tahun 2016 kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan baik.

Tetap bekerja, jangan menunggu sampai kabut asap datang lagi!"

- Gejala ancaman terhadap kepunahan sejumlah spesies dan penurunan **keanekaragaman hayati** cenderung meningkat juga mesti menjadi perhatian untuk di atasi. Salah satu solusi dari masalah tersebut adalah dengan melestarikan habitat mereka. Pelaksanaan di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat harus lebih ditegakkan untuk mengurangi angka kejahatan terhadap spesies langka yang dimiliki oleh Indonesia.
-

a. Modus-modus Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1). Perambahan Kawasan Hutan



Modus seperti adanya klaim masyarakat adat. Adanya kegiatan perkebunan terorganisir oleh pemodal besar atas nama lembaga koperasi/kelompok tani. Adanya sertifikat HM dalam kawasan hutan. Adanya tumpang tindih kewenangan perijinan, seperti BP Batam mengeluarkan ijin Hak Pengusahaan Lahan dalam kawasan Konservasi. Adanya pembangunan fasos, fasum dan kantor pemerintah dalam kawasan. Adanya keterlibatan oknum penegak hukum lainnya.

2). Pencemaran Industri



a. Sektor Energi = Membuang limbah B3 (fly ash) ke media lingkungan tanpa izin. Menempatkan limbah B3 (fly ash) tanpa izin;
 b. Sektor Minerba = Membuang air limbah (air asam tambang) ke media lingkungan tanpa izin;
 c. Sektor Industri dan Manufaktur = Pembuangan air limbah kegiatan pengalengan ikan. Melakukan Impor Limbah B3. Melakukan pengelolaan limbah B3 (penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan dan/atau pemanfaatan) tanpa izin.

3). Kerusakan Lingkungan



a. Sektor Minerba
 Melakukan penambangan batu bara tanpa Dokumen Lingkungan. Melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Mangrove tanpa Dokumen Lingkungan. Melakukan penambangan galian Gol. C yang merusak lingkungan. Tidak melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca penambangan.
 b. Sektor Kehutanan dan Perkebunan
 Penebangan hutan tanpa memiliki Dokumen Lingkungan;



4). Modus Pencemaran Lingkungan Limbah B3 di Sektor Jasa



Rumah Sakit tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 (TPS dan Incinerator).
Hotel tidak memiliki izin pengelolaan limbah b3 (TPS limbah b3).
Pengelola Limbah B3 tidak memiliki izin pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan.
Pengelola limbah b3 memiliki izin palsu (pengangkutan limbah b3), dll.

5). Modus Kebakaran Hutan dan Lahan



Cara yang paling mudah dan murah untuk pembukaan lahan/pembuatan kebun.
Cara pengolahan lahan masyarakat untuk berkebun.
Konflik masyarakat dengan perusahaan (hutan dan perkebunan). Pembukaan lahan baru oleh perusahaan perkebunan.

6). Modus Illegal Logging



Adanya "Cukong" yang memberikan "Uang Muka" kepada masyarakat lokal untuk menebang kayu di dalam kawasan. Adanya kebutuhan/pesanan sawmill (pembuatan profil).
Adanya kebutuhan masyarakat (seperti, rumah).
Mengatasnamakan masyarakat adat.
Adanya keterlibatan oknum penegak hukum yang membeking peredaran kayu.

7). Modus Perdagangan Illegal TSL Langka/Kejahatan Keanekaragaman Hayati



Adanya sindikat perdagangan TSL. Nilai ekonomis tinggi. Hobby. Konflik dengan manusia karena dianggap hama. pemasangan jerat tradisional.

b. Strategi Penegakan Hukum:



c. Hambatan Penegakan Hukum;

No (1)	Hambatan (2)	Detail Hambatan (3)	Solusi (4)
1	Kebijakan	Tumpang tindih didalam kebijakan	Harmonisasi Peraturan Perundangan
2	Eksekusi	Beberapa putusan tidak dapat di eksekusi	Pembentukan Satgas Eksekusi
3	Responsivitas	Minimnya daya tanggap penegak hukum	Diklat untuk Penegak Hukum
4	Alat Bukti	Kesulitan di dalam pembuktian	Penggunaan Teknologi untuk Pembuktian (Laboratorium Forensik)
5	Akses	Lokasi sulit di jangkau	Penggunaan Helikopter dan Drones
6	Anggaran	Biaya penanganan kasus tinggi	Penggunaan Perangkat Teknologi yang Mutakhir
7	Sumber Daya Manusia	Tenaga Ahli dan Saksi di Pengadilan Terbatas	Penguatan Jejaring

B. Komitmen Penegakan Hukum

Komitmen Presiden Republik Indonesia; Sesuai dengan Komitmen Presiden Joko Widodo yang di utarakan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2015, "Lakukan tindakan asertif terhadap pelaku pembalakan liar, penambangan liar, dan penangkapan ikan ilegal" - Joko Widodo

Sesuai dengan Isi Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) "Memperkuat kehadiran Negara dalam mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.". Meningkatkan *Fair Law Enforcement*. Memerangi Penebangan Liar, Perikanan Ilegal, dan Pertambangan Ilegal.

Konstitusi Hijau (UUD 45), UUD RI 1945 No 28 H (1) "*Setiap orang berhak untuk hidup dalam kemakmuran fisik dan spiritual, memiliki rumah dan menikmati lingkungan yang baik dan sehat, dan berhak mendapatkan perawatan medis.*"

UUD RI 1945 No 33 (4) "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*"

C. Instrumen Hukum

Pelaksanaan Penegakan Hukum harus dilandaskan pada aturan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penegakan Hukum tidak hanya dapat dilakukan oleh Direktorat yang berkedudukan di Pusat namun juga dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. GAKKUM KLHK dilakukan oleh aparat fungsional dan juga melibatkan masyarakat sesuai dengan Pedoman dan tata kerja dengan standar berlaku.

No	Instrumen Hukum	Tahun	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Undang Undang Nomor 5	1990	Konservasi Sumber Daya Hidup dan Ekosistemnya
2	Undang Undang Nomor 41	1999	Kehutanan
3	Undang Undang Nomor 32	2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Undang Undang Nomor 18	2013	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
5	Undang Undang Nomor 8	2010	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
6	Undang Undang Nomor 37	2014	Konservasi Tanah dan Air
7	Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18	2014	Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

D. Rencana Kerja Pemerintah

Sesuai dengan Arah Presiden Republik Indonesia, Bpk Joko Widodo, pelaksanaan *Money Follow Program* di dalam Strategi Nasional Rencana Kegiatan Pemerintah Tahun 2018 turut mempengaruhi Secara Signifikan Program GAKKUM KLHK di tahun 2018. Dan Jika mengikuti Rencana Strategis 2015-2019 langkah ini seperti menggeser milestones pembangunan Tahun 2019 ke Tahun 2018.

Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Langkah ini justru menjadi semacam penajaman kembali atas peran GAKKUM KLHK. Bahkan di dalam benak kami, penajaman ini terlihat lebih nyata untuk mengantarkan tujuan pembangunan Penegakan Hukum dengan Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah ke Publik. Selanjutnya di dalam proses perumusan dari penajaman kinerja GAKKUM KLHK yang telah di lakukan di berbagai forum dan mekanisme, mulai dari Multilateral Meeting I dan II, Bilateral Meeting I dan II, serta Trilateral Meeting I dan II, maka dipertajam untuk Rencana Kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tahun 2018.



Memperkuat Kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

Rencana Kerja Tahun 2018 Lingkup Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK mengacu pada RKP Tahun 2018, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK. RKP 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.



Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan: Kepastian Hukum: Penegakan Hukum yang Berkualitas

9. PN POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN



Rancangan Program Prioritas: Kepastian Hukum

PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Pengawasan Hukum yang Berkualitas	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif	Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Penyidikan dan Penuntutan	Kolaborasi Pencegahan Korupsi	Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Pengurangan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan	Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di tingkat Pusat	Peningkatan Kerjasama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal di Kab/Kota dalam Penyaluran Bantuan Hukum
Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara (SPPT-TI)		
Pelayanan Hukum yang mendukung Kemudahan Berusaha		
Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan Pemahaman Masyarakat tentang SPPA		
Evaluasi dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		
Pengawasan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam		

E. Program dan Kegiatan Tahun 2018

PEMBANGUNAN KEMENTERIAN 2015-2019

NILAI
Pembangunan berkelanjutan

TUJUAN
Memastikan kondisi lingkungan berada pada **TAHANAN YANG DIMUNDAHKAN** untuk kehidupan manusia, dan sumberdaya berada pada **RENTANG POPULASI YANG AMAN**, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan **KESEHATAN DAN PERSEKUTUAN NASIONAL**.

SASARAN STRATEGIS

MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat

MEMANFAATKAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

MELESTARIKAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Indeks Kualitas Lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5- 68,5. Peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap Penerimaan devisa dan PNPB sebagai masukan terhadap POB nasional. Derajat Keseimbangan Ekosistem meningkat setiap tahun

1. Matriks Indikator Kinerja Utama/Sasaran/Program, terkait GAKKUM LHK;

K/L (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (SS 1)	Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 64-65 (IKU 1)
	Memfaatkan Potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (SS 2)	Jumlah PNPB dari Produksi Barang dan Jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2017 sebesar Rp. 3,9 triliun (IKU 2)
	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS 3)	Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70 sebanyak 260 Unit (IKU 4)



2. Matriks Sasaran Program, Output Program, Indikator Kinerja Program GAKKUM LHK

Program	Sasaran Program	Output Program	Indikator Kinerja Program	Target 2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7)				
	Seluruh Pemegang Izin Lingkungan Menaati Peraturan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	65 %
	Meningkatnya Hak-Hak Negara atas Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup	Penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	40 Kasus
	Meningkatkan kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	Seluruh Unit Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	5.000.000 Hektar

3. Matriks Penanggung Jawab Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Kode	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
	(1)	(2)	(3)
P7	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7)		
K1		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
K2		Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
K3		Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
K4		Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
K5		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya	Sekretariat Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK

*Disesuaikan dengan Aplikasi KRISNA TA 2018

4. Matriks Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan TA 2018

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan TA 2018
	(1)	(2)
K1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi
		Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana SPORC
K2	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Pendaftaran, Penyusunan Gugatan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Gugatan Perdata Melalui Pengadilan
		Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan yang telah diverifikasi dan selesai melalui kesepakatan
K3	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Tertanganinya 100% pengaduan yang masuk
		Peningkatan Penataan Usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan LHK dan PUU yang berlaku
		Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPLH
K4	Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Berkas perkara di nyatakan lengkap)
		Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPNS
K5	Terwujudnya reformasi tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal PHLHK	SAKIP Ditjen PHLHK minimal 78 Poin di tahun 2019

5. Matrik Proyek Prioritas Nasional TA 2018 : Ditjen GAKKUM LHK

I.	Prioritas Nasional	Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan
II.	Program Prioritas	Kepastian Hukum
III.	Proyek Prioritas Nasional	Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam
No	Proyek K/L	
	(1)	Target TA 2018 (2)
1	Pencegahan Tindak Pidana Pemanfaatan SDA dan Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	5.000.000 Hektar
2	Penegakan Hukum Pidana Pemanfaatan SDA	75% dari P-21 (100 Kasus)
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Pemanfaatan SDA	100% dari 1000 Pengaduan
4	Pengawasan penanggungjawab usaha/kegiatan dalam pemanfaatan SDA	100% dari 600 Izin
5	Penegakan Hukum Administrasi Pemanfaatan SDA	70% dari 200 Sanksi Administrasi
6	Penegakan Hukum Perdata Pemanfaatan SDA	10 Gugatan
7	Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan SDA	75%
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Appakum Bidang SDA	2500 Orang (POLHUT, PPLH,PPNS)

6. Matrik Anggaran Proyek Prioritas Nasional TA 2018 : Ditjen GAKKUM LHK

No	Output K/L (Proyek Prioritas Nasional)	Alokasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Pencegahan Tindak Pidana Pemanfaatan SDA dan Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	65.070.748.000,-
2	Penegakan Hukum Pidana Pemanfaatan SDA	65.194.830.000,-
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Pemanfaatan SDA	13.522.600.000,-
4	Pengawasan penanggungjawab usaha/kegiatan dalam pemanfaatan SDA	13.750.000.000,-
5	Penegakan Hukum Administrasi Pemanfaatan SDA	13.750.000.000,-
6	Penegakan Hukum Perdata Pemanfaatan SDA	9.599.000.000,-
7	Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan SDA	8.600.000.000,-
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Appakum Bidang SDA	52.796.822.000,-
TOTAL		248.322.241.000,-

No	Output K/L (Prioritas Bidang)	Alokasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
9	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya	13.798.201.000

7. Matrik Sinkronisasi Indikator Kinerja per Kegiatan sesuai Output Proyek Prioritas Nasional TA 2018

A. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K1) di dalam Proyek Prioritas Nasional Tahun 2018

Kegiatan K/L	Sasaran Kegiatan	Output	Target
Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K1)	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi	5.000.000 Hektar
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum	1800 Orang

Proyek PN	Sasaran Pro PN	Output/Proyek K/L	Target
Proyek Penegakan Hukum bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Penegakan Hukum bidang Sumber Daya Alam	Pencegahan Tindak Pidana Pemanfaatan SDA dan Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	5.000.000 Hektar
		Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Aparat Penegak Hukum	1800 Orang

B. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (K2) di dalam Proyek Prioritas Nasional Tahun 2018

Kegiatan K/L	Sasaran Kegiatan	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (K2)	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Pendaftaran Gugatan Perdata LH melalui Pengadilan	10 Gugatan
		Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	75%

Proyek Prioritas Nasional	Sasaran Pro PN	Output/Proyek K/L	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Proyek Penegakan Hukum bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Penegakan Hukum bidang Sumber Daya Alam	Penegakan Hukum Perdata Pemanfaatan Sumber Daya Alam	10 Gugatan
		Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pemanfaatan Sumber Daya Alam	75%

C. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi (K3) di dalam Proyek Prioritas Nasional Tahun 2018

Kegiatan K/L	Sasaran Kegiatan	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanganan Pengaduan , Pengawasan Izin dan Sanksi Administrasi	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	100% dari 1000 Pengaduan
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	100% dari 600 Izin
		Penerapan Sanksi Administrasi	70% dari 200 Izin
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	300 Orang

Proyek PN	Sasaran Proyek PN	Output/ Proyek K/L	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Proyek Penegakan Hukum bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Penegakan Hukum bidang Sumber Daya Alam	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam	100% dari 1000 Pengaduan
		Pengawasan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	100% dari 600 Izin
		Penegakan Hukum Administrasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	70% dari 200 Izin
		Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Aparat Penegak Hukum	300 Orang

D. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K4) di dalam Proyek Prioritas Nasional Tahun 2018

Kegiatan K/L (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Output (3)	Target (4)
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)	75% dari 100 Kasus
		Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPNS	400 Orang

Kegiatan K/L (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Output/ Proyek K/L (3)	Target (4)
Proyek Penegakan Hukum bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Penegakan Hukum bidang Sumber Daya Alam	Penegakan Hukum Pidana Pemanfaatan Sumber Daya Alam	75% dari 100 Kasus
		Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Aparat Penegak Hukum	400 Orang

E. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Unit Teknis Lainnya (K5), Proyek Bidang di dalam Proyek Prioritas Nasional Tahun 2018;

Kegiatan K/L (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Output Proyek Bidang (3)	Target (4)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK (K5)	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK		
		SAKIP Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019;	76 Poin

BAB IV.

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2018 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2017, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2019.

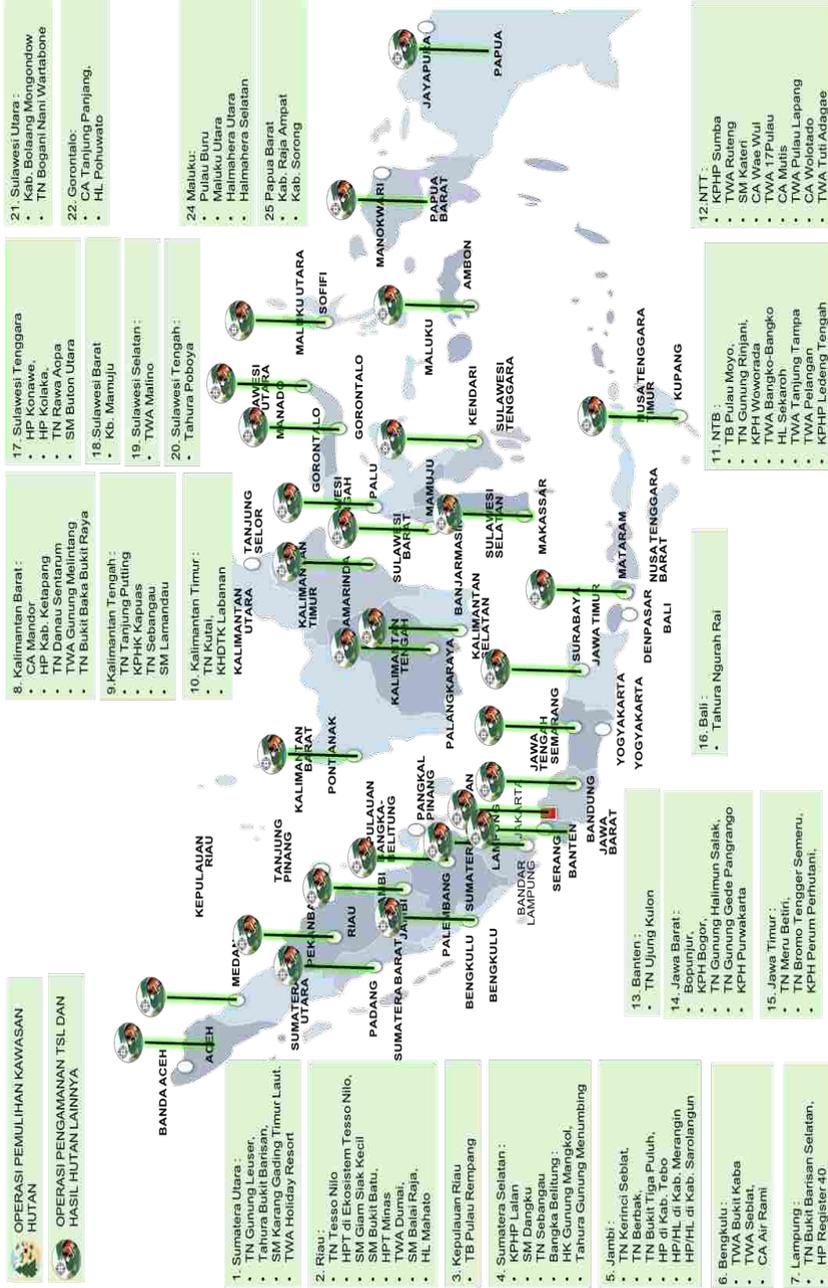
Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2018 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Jenderal GAKKUM LHK. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2018.

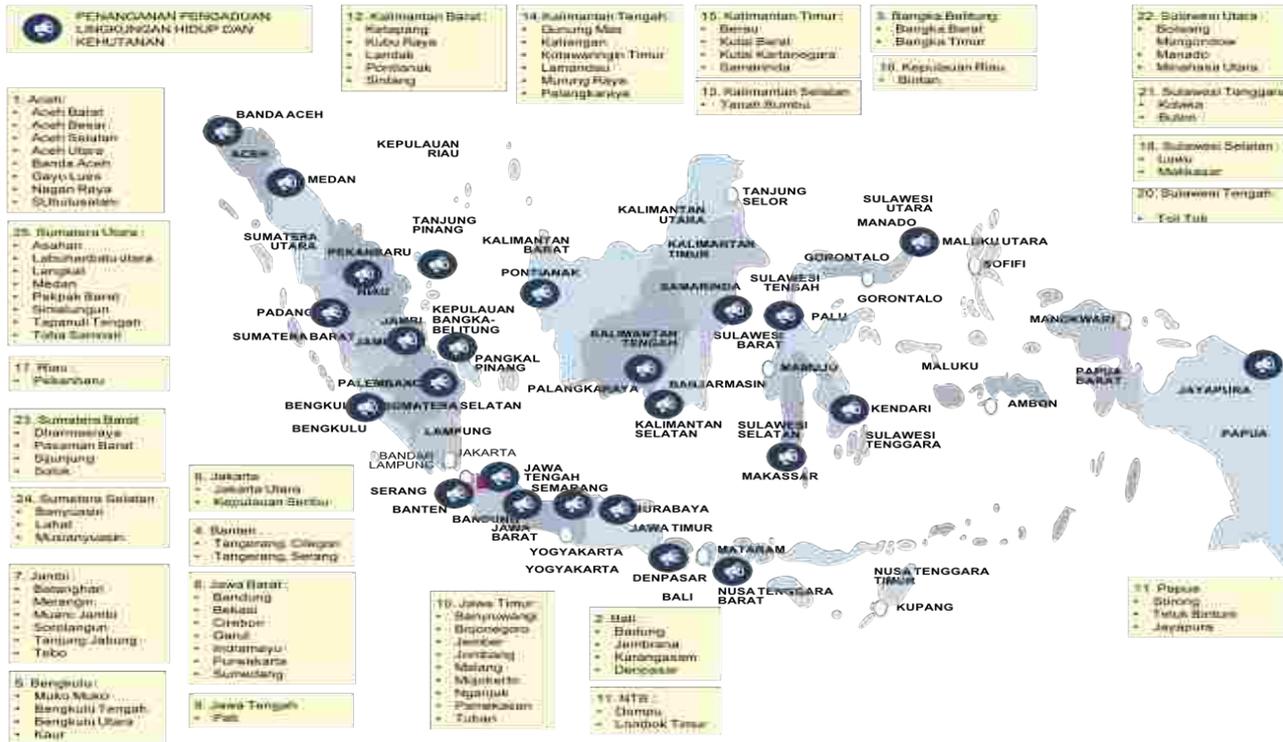


BAB V.
LAMPIRAN LAMPIRAN



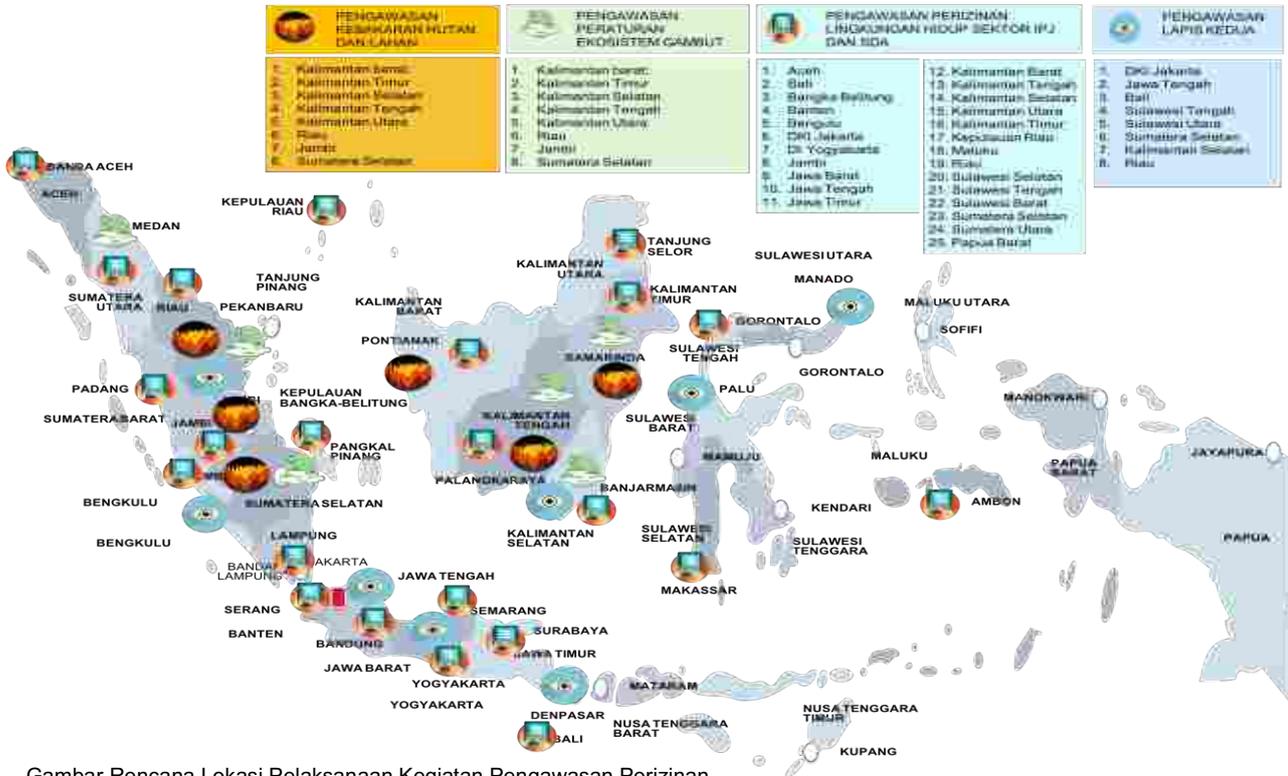
OPERASI PEMULIHAN KAWASAN
HUTANOPERASI PENGAMANAN TSL DAN
HASIL HUTAN LAINNYA

Gambar Rencana Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan



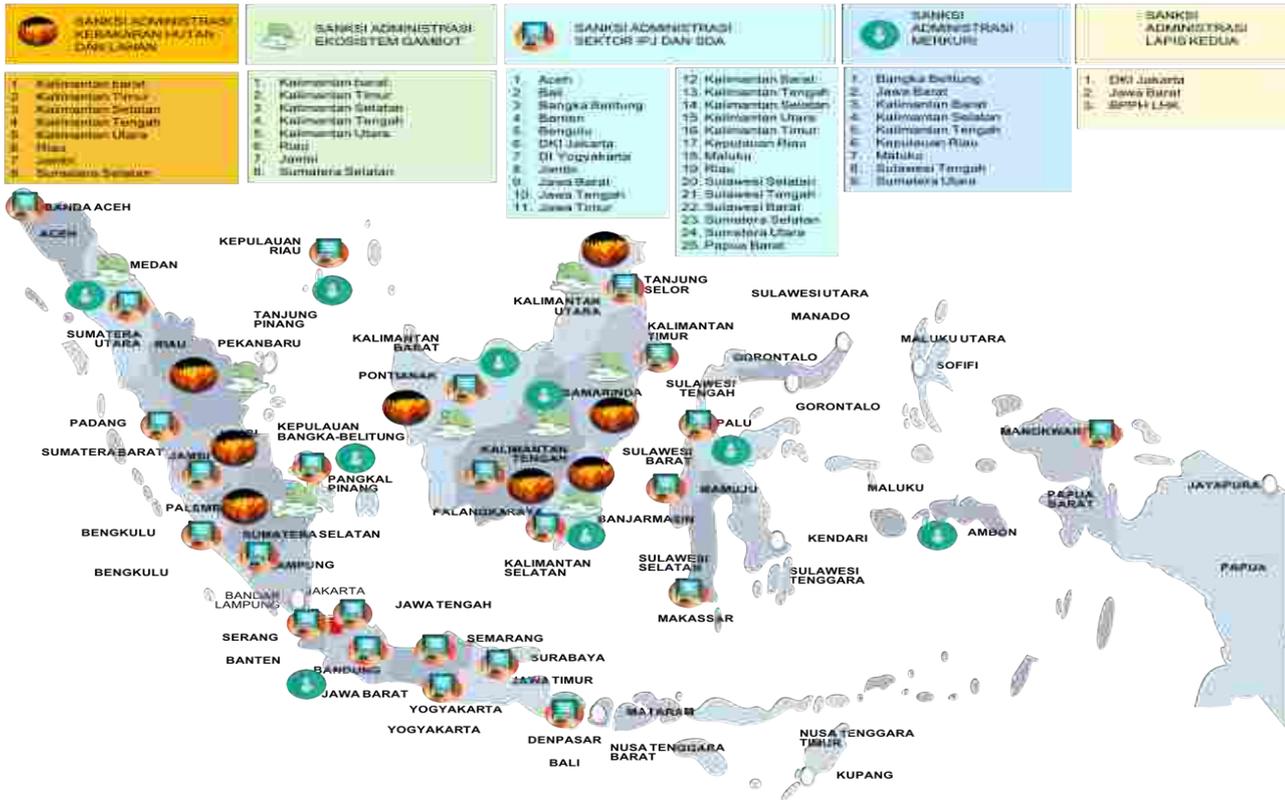
PENANGGAMAN PENGGADUAN

Gambar Rencana Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengaduan LHK



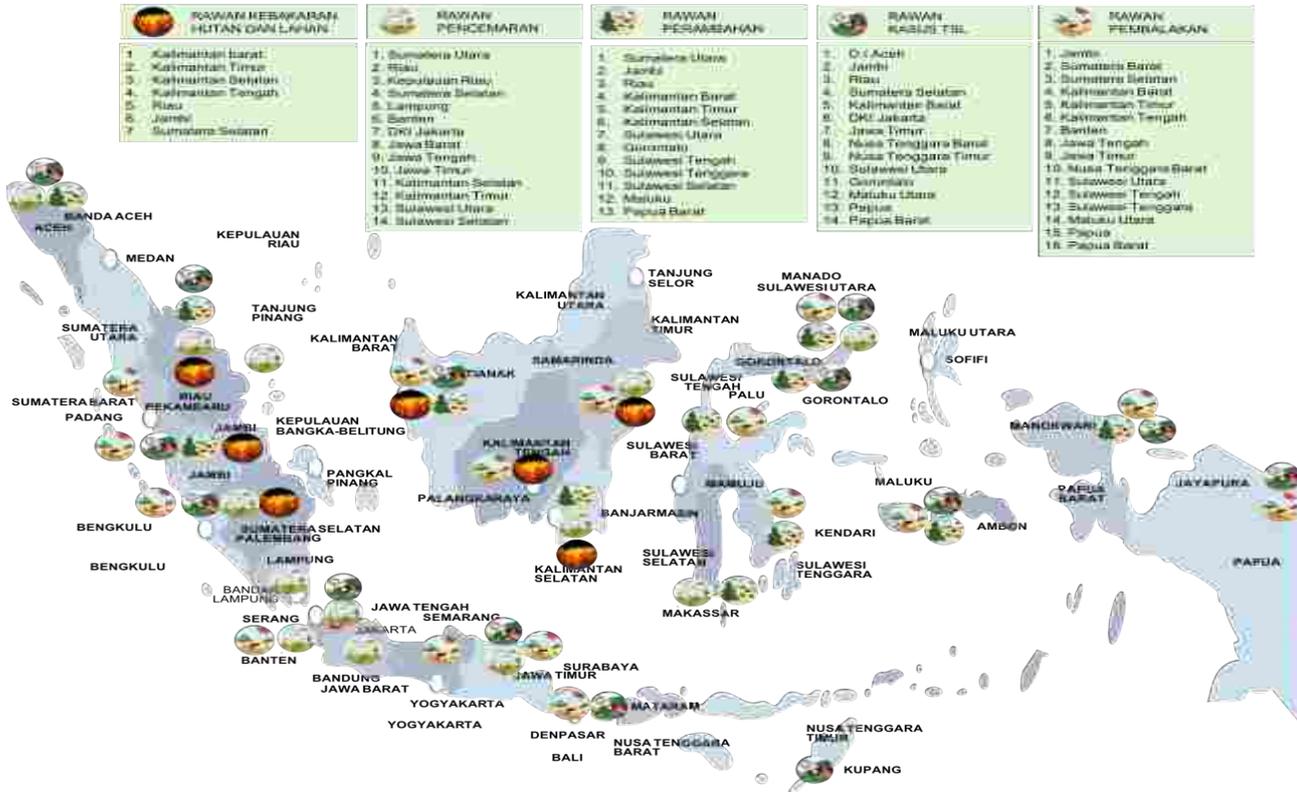
PENGAWASAN PERIZINAN

Gambar Rencana Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Perizinan



SANKSI ADMINISTRASI

Gambar Rencana Lokasi Penataan Sanksi Administrasi



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Gambar Rencana Lokasi Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kode	Program Dan Sumber Dana	Rincian Anggaran Belanja		
		Operasional	Non Operasional	Jumlah
029.12	GAKKUM LHK	124.274.180	248.332.201	372.606.381
a	RM	124.274.180	209.178.840	333.453.020
b	RMP	0	0	0
c	PNBP	0	39.153.361	39.153.361

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran 2018
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya	138.072.381.000
2	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	40.272.600.000
3	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	18.199.000.000
4	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	98.059.600.000
5	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.002.800.000
	Pagu Non Operasional TA 2018 Ditjen GAKKUM KLHK	248.332.201.000



NO	SATKER	PAGU ANGGARAN 2018					
		Belanja Gaji	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional			Jumlah
				RM	PNBP	Jumlah	
1	Setditjen PHLHK	35,641,149,000	2,576,018,000	12,798,201,000	1,000,000,000	13,798,201,000	52,015,368,000
2	Direktorat PPSA		946,970,000	15,344,524,000	3,550,000,000	18,894,524,000	19,841,494,000
3	Direktorat PSLH		941,570,000	14,999,000,000	3,200,000,000	18,199,000,000	19,140,570,000
4	Direktorat PPH		1,177,280,000	18,482,401,000	5,003,361,000	23,485,762,000	24,663,042,000
5	Direktorat PHP		871,000,000	15,426,130,000	4,600,000,000	20,026,130,000	20,897,130,000
6	BPPH LHK Wilayah Sumatera	18,320,606,000	1,755,060,000	31,676,363,000	6,350,000,000	38,026,363,000	58,102,029,000
7	BPPH LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	14,434,833,000	2,096,950,000	30,550,993,000	5,850,000,000	36,400,993,000	52,932,776,000
8	BPPH LHK Wilayah Kalimantan	16,222,086,000	1,440,562,000	26,079,263,000	4,500,000,000	30,579,263,000	48,241,911,000
9	BPPH LHK Wilayah Sulawesi	14,116,584,000	1,027,950,000	23,803,045,000	2,750,000,000	26,553,045,000	41,697,579,000
10	BPPH LHK Wilayah Maluku Papua	11,538,922,000	1,166,640,000	20,018,920,000	2,350,000,000	22,368,920,000	35,074,482,000
TOTAL		110,274,180,000	110,274,180,000	14,000,000,000	209,178,840,000	39,153,361,000	248,332,201,000



REKAPITULASI KEGIATAN DITJEN PHLHK TAHUN 2018			
PROGRAM/KEG/OUTPUT	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			248.332.201.000
PRIORITAS NASIONAL			234.534.000.000
Pencegahan dan Pengamanan Hutan			98.059.600.000
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	5,000,000	Ha	65.070.058.000
Jumlah Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum	1,800	Orang	32.988.352.000
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			18,199,000,000
Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	10	Gugatan	9,599,000,000
Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan diluar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	75	Persen	8,600,000,000
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi			40,272,600,000
Pengaduan yang masuk tertangani	100	Persen	13,522,600,000
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	100	Persen	13,750,000,000
Penerapan sanksi administrasi	70	Persen	6,000,000,000
Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	300	Orang	7,000,000,000
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan			78,002,800,000
Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)	75	Persen	65,194,830,000
Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan memenuhi standar minimum	400	Orang	12,807,970,000
PRIORITAS BIDANG			13,798,201,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			13,798,201,000
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen PHLHK	76	Point	12,068,201,000
Layanan Intenal	1	Layanan	1.730.000.000



Program/Kegiatan/ Output/Sub output/Komponen	Semula		Menjadi	
	Vol	Pagu	Vol	Pagu
Pencegahan dan Pengamanan Hutan		100,059,600,000		98.059.600.000
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	5 Juta	70,869,227,500	5 Juta	65.070.058.000
Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan		9,092,840,000		4.502.700.000
Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan		2,645,300,000		2.786.870.000
Operasi Pengaman Hutan		37,255,299,500		35.465.500.000
Operasi Peredaran Hasil Hutan		18,508,788,000		18.967.168.000
Sosialisasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		1,367,000,000		1.352.040.000
Penguatan Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		2,000,000,000		1.996.470.000
Jumlah Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum	1,80 0	29,190,372,500	1,80 0	32.988.352.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan		20,166,960,000		18.953.400.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan		3,000,000,000		6.158.412.000
Peningkatan Kapasitas POLHUT		6,023,412,500		7.877.040.000
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		18,199,000,000		18,199,000,000
Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	10	9,599,000,000	10	9,599,000,000
Verifikasi Gugatan Perdata		654,000,000		654,000,000
Penghitungan Kerugian		4,428,300,000		4,428,300,000
Pelaksanaan Persidangan		3,955,240,000		3,955,240,000
Penyusunan NSPK		99,000,000		99,000,000
Penyusunan Laporan		50,000,000		50,000,000
Peningkatan Kapasitas		412,460,000		412,460,000
Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan diluar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	75	8,600,000,000	75	8,600,000,000
Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup		6,900,000,000		6,900,000,000
Penyusunan NSPK		200,000,000		200,000,000



Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan		340,000,000		340,000,000
Peningkatan Kapasitas		660,000,000		660,000,000
Penguatan Tugas dan Fungsi PSLH		500,000,000		500,000,000
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		42,772,600,000		40,272,600,000
Pengaduan yang masuk tertangani	100	16,022,600,000	100	13,522,600,000
Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan		3,926,814,000		6.026.814.000
Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla		8,050,000,000		5.450.000.000
Pengembangan Sistem Pengaduan		3,045,786,000		1.045.786.000
Penguatan Tugas dan Fungsi PPSA		1,000,000,000		1.000.000.000
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	100	13,750,000,000	100	13,750,000,000
Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan		2,557,375,000		2.557.375.000
Pengawasan Penataan Peraturan Pengendalian Ekosistem Gambut		3,535,325,000		3.535.325.000
Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor IPJ dan Sektor SDA		5,986,300,000		5.986.300.000
Pengawasan Perizinan Lapis Kedua		1,671,000,000		1.671.000.000
Penerapan sanksi adminitrasi	70	8,000,000,000	70	6,000,000,000
Pengenaan Sanksi Administrasi		7,000,000,000		5.500.000.000
Penegakan Hukum Administrasi Lapis Kedua		500,000,000		500.000.000
Pembuatan Aplikasi Penerapan Sanksi Administrasi On-Line		500,000,000		0
Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	300	5,000,000,000	372	7,000,000,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana PPLH		3,500,000,000		4.000.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PPLH		500,000,000		1.000.000.000
Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi PPLH		1,000,000,000		2.000.000.000
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		79,002,800,000		78,002,800,000
Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)	75	66,194,830,000	75	65,194,830,000
Verifikasi/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK		22,305,350,000		21.305.350.000
Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Bidang LHK		19,347,080,000		19.347.080.000
Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK		3,826,520,000		3.826.520.000
Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK		2,174,100,000		2.174.100.000
Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK		15,667,430,000		15.667.430.000



Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK		1,874,350,000		1.874.350.000
Penguatan Tugas Fungsi Penegakan Hukum Pidana LHK		1,000,000,000		1.000.000.000
Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan memenuhi standar minimum	400	12,807,970,000	400	12,807,970,000
Penyediaan Sarana dan Prasaran PPNS dan Pemeliharaan		5,222,380,000		6.222.380.000
Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi PPNS		7,585,590,000		6.585.590.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		134,572,381,000		138.072.381.000
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	76	10,298,201,000	76	13,798,201,000
Program dan Anggaran		1,905,656,000		2.255.656.000
Evaluasi, Pelaporan, Data, Informasi dan Kehumasan		1,910,519,000		3.210.519.000
Kerjasama dan Kemitraan		938,130,000		1.038.130.000
Rancangan Perundang-undangan		758,700,000		758.700.000
Administrasi Kepegawaian		748,950,000		748.950.000
Pengembangan Ortala		1,405,425,000		1.055.425.000
Administrasi Keuangan		912,562,000		1.212.562.000
Administrasi Perlengkapan		1,046,694,000		816.694.000
Ketatausahaan dan Umum		671,565,000		971.565.000
Layanan Intenal	12	124,274,180,000	12	124,274,180,000
Gaji dan Tunjangan		110,274,180,000		110,274,180,000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor		14,000,000,000		14,000,000,000
TOTAL PAGU		374,606,381,000		372,606,381,000



REKAPITULASI KEGIATAN DITJEN PHLHK TAHUN 2018

KODE	PROGRAM/KEG/ OUTPUT	TARGET 2017	TARGET 2018	SATU AN	ANGGARAN 2018	LOKASI	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
029.12	PROGRAMPHLHK				372,606,381,000				
PRIORITAS NASIONAL					234,534,000,000				
029.12.5 428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan				98.059.600.000				
029.12.5 428.001	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	4 Juta	5 Juta	Ha	65.070.058.000	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa	PENEGAK AN HUKUM YANG BERKUAL ITAS	KEPASTIAN HUKUM	POLITIK, HUKUM, PERTAHAN AN DAN KEAMANAN



						Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali , Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua			
029.12.5 428.002	Jumlah Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum	1500 Orang	1,800	Orang	32.988.352.000	SATKER PUSAT DAN UPT DI 5 (LIMA) BPPH LHK	PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS	KEPASTIAN HUKUM	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
029.12.5 429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				18,199,000,000				
029.12.5 429.001	Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	10	10	Gugatan	9,599,000,000	Riau, Jambi, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Jabar, Sumut, Sumbar,	PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS	KEPASTIAN HUKUM	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN



						Bengkulu, Sulut, Sulteng, Gorontalo, Tangerang			
029.12.5 429.002	Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan diluar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	75	75	Pers en	8,600,000,000	Riau, Jambi, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Jabar, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Sulut, Sulteng, Gorontalo, Tangerang	PENEGAK AN HUKUM YANG BERKUAL ITAS	KEPASTIAN HUKUM	POLITIK, HUKUM, PERTAHAN AN DAN KEAMANAN
029.12.5 430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				40,272,600,000				
029.12.5 430.001	Pengaduan yang masuk tertangani	100% dari 500 Pengaduan	100	Pers en	13,522,600,000	Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,	PENEGA KAN HUKUM YANG BERKUA LITAS	KEPASTIA N HUKUM	POLITIK, HUKUM, PERTAHA NAN DAN KEAMANA N



						Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, NTB, Sulawesi Selatan, Sulteng, Sultra, Sulut, Sumbang, Sumsel, Sumut			
029.12.5 430.002	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan	60% dari 500 Izin	100	Persen	13,750,000,000	Bali, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku,	PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS	KEPASTIAAN HUKUM	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN



						Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Aceh, Bengkulu, Papua, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,			
029.12.5 430.003	Penerapan sanksi adminitrasi	70 Persen dari 100 Sanksi Administra si	70	Pers en	6,000,000,000	Bali, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,	PENEGA KAN HUKUM YANG BERKUA LITAS	KEPASTIA N HUKUM	POLITIK, HUKUM, PERTAHA NAN DAN KEAMANA N



						Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Aceh, Bengkulu, Papua, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,			
029.12.5 430.004	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	43	300	Orang	7,000,000,000	SATKER PUSAT DAN UPT DI 5 (LIMA) BPPH LHK	PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS	KEPASTIA N HUKUM	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANA N



029.12.5 431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan				78,002,800,000				
029.12.5 431.001	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)	75	75	Pers en	65,194,830,000	KPHK, KPHL, TN, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, Papua Barat 9 Provinsi Rawan Kebakaran,K PHK, KPHL, TN, Papua, Papua Barat, Sumatera	PENEGA KAN HUKUM YANG BERKUA LITAS	KEPASTIA N HUKUM	POLITIK, HUKUM, PERTAHA NAN DAN KEAMANA N



						Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bangka- Belitung, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat			
029.12.5 431.002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan memenuhi standar minimum		400	Orang	12,807,970,000	SATKER PUSAT DAN UPT DI 5 (LIMA) BPPH LHK	PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS	KEPASTIA N HUKUM	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANA N
PRIORITAS BIDANG					138,072,381,000				
029.12.5 427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				138.072.381.000				
029.12.5 427.001	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen PHLHK	75	76	Poin t	12,068,201,000	PUSAT			
029.12.5 427.951	Layanan Intenal		1	Laya nan	1.730.000.000	PUSAT			
029.12.5 427.994	Layanan Perkantoran		12	Bula n	124.274.180.000	SATKER PUSAT DAN UPT DI 5 (LIMA) BPPH LHK			



A. MATRIKS TARGET, ANGGARAN PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET ESELON I	Sat	PAGU ANGGARAN 2018
1	5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan			98,059,600
	001	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	5,000,000	Ha	65,070,748
	051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan			4,502,700
	052	Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan			2,786,870
	053	Operasi Pengamanan Hutan			35,465,500
	054	Operasi Peredaran Hasil Hutan			18,967,168
	055	Sosialisasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan			1,352,040
	056	Penguatan Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan			1,996,470
	002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	1,800	Orang	32,988,852
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan			18,953,400
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan			6,158,412
	053	Peningkatan Kapasitas POLHUT			7,877,040
2	5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			18,199,000
	001	Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	10	Gugatan	9,599,000
	051	Verifikasi Gugatan Perdata			654,000
	052	Penghitungan Kerugian			4,428,300
	053	Pelaksanaan Persidangan			3,955,240
	054	Penyusunan NSPK			99,000
	055	Penyusunan Laporan			50,000
	056	Peningkatan Kapasitas			412,460
	002	Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	75	Persen	8,600,000
	051	Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup			6,900,000
	052	Penyusunan NSPK			200,000



	053	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan			340,000
	054	Peningkatan Kapasitas			660,000
	055	Penguatan Tugas dan Fungsi PSLH			500,000
3	5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi			40,272,600
	001	Pengaduan yang masuk tertangani	100	Persen	13,522,600
	051	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan			6,026,814
	052	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla			5,450,000
	053	Pengembangan Sistem Pengaduan			1,045,786
	054	Penguatan Tugas dan Fungsi PPSA			1,000,000
	002	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	100	Persen	13,750,000
	051	Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan			2,557,375
	052	Pengawasan Penataan Peraturan Pengendalian Ekosistem Gambut			3,535,325
	053	Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor Industri, Prasarana dan Jasa dan Sektor SDA			5,986,300
	054	Pengawasan Perizinan Lapis Kedua			1,671,000
	003	Penerapan sanksi administrasi	70	Persen	6,000,000
	051	Pengenaan Sanksi Administrasi			5,500,000
	052	Penegakan Hukum Administrasi Lapis Kedua			500,000
	053	Pembuatan Aplikasi Penerapan Sanksi Administrasi On-Line			
	004	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar minimum	300	Orang	7,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPLH			4,000,000
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PPLH			1,000,000
	053	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi PPLH			2,000,000
4	5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan			78,002,800
	001	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	75	Persen	65,194,830
	051	Verifikasi/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK			21,305,350
	052	Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Bidang LHK			19,347,080
	053	Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK			3,826,520
	054	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK			2,174,100
	055	Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK			15,667,430
	056	Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK			1,874,350



	057	Penguatan Tugas Fungsi Penegakan Hukum Pidana LHK			1,000,000
	002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan yang memenuhi standar minimum	400	Orang	12,807,970
	051	Penyediaan Sarana dan Prasaran PPNS dan Pemeliharaan			6,222,380
	052	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi PPNS			6,585,590
5	5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			138,072,381
	001	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	76	Poin	12,068,201
	051	Program dan Anggaran			2,255,656
	052	Evaluasi, Pelaporan, Data, Informasi dan Kehumasan			3,210,519
	053	Kemitraan dan Kerjasama Teknik			1,038,130
	054	Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Hukum			758,700
	055	Administrasi Kepegawaian			748,950
	056	Pengembangan Ortala			1,055,425
	057	Administrasi Keuangan			1,212,562
	058	Administrasi Perlengkapan			816,694
	059	Ketatausahaan dan Umum			971,565
	951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	1,730,000
	995	Pengadaan Kendaraan Bermotor			25,000
	996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			55,000
	997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			1,500,000
	998	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan			150,000
	994	Layanan Perkantoran	10	Bulan	124,274,180
	A	Gaji dan Tunjangan			110,274,180
	B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			14,000,000
					372,606,381

**B. MATRIKS TARGET, ANGGARAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN**

NO	KODE	KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET ESELON I	Sat	PAGU ANGGARAN 2018	PNBP	RM	PUSAT	
								Target	Anggaran
1	5428	PPH			98,059,600	13,753,361	84,306,239		23,485,762,000
	001	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	5 Juta	Ha	65,070,748	11,753,361	53,317,387	750,000	14,259,910,000
	051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan			4,502,700	753,361	3,749,339		2,600,300,000
	052	Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan			2,786,870	1,000,000	1,786,870		1,536,870,000
	053	Operasi Pengaman Hutan			35,465,500	6,000,000	29,465,500		6,960,200,000
	054	Operasi Peredaran Hasil Hutan			18,967,168	4,000,000	14,967,168		2,431,030,000
	055	Sosialisasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan			1,352,040		1,352,040		235,040,000
	056	Penguatan Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan			1,996,470		1,996,470		496,470,000
	002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	1,800	Org	32,988,852	2,000,000	30,988,852	1,127	9,225,852,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan			18,953,400		18,953,400		3,298,400,000
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan			6,158,412		6,158,412		638,412,000
	053	Peningkatan Kapasitas POLHUT			7,877,040	2,000,000	5,877,040		5,289,040,000



C. MATRIKS TARGET, ANGGARAN KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET ESELON I	Sat	PAGU ANGGARAN 2018	PNBP	RM	DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	
								Target	Anggaran
2	5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			18,199,000	3,200,000	14,999,000		18,199,000,000
	001	Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	10	Gugatan	9,599,000	1,900,000	7,699,000	10	9,599,000,000
		051 Verifikasi Gugatan Perdata			654,000	100,000	554,000		654,000,000
		052 Penghitungan Kerugian			4,428,300	750,000	3,678,300		4,428,300,000
		053 Pelaksanaan Persidangan			3,955,240	750,000	3,205,240		3,955,240,000
		054 Penyusunan NSPK			99,000		99,000		99,000,000
		055 Penyusunan Laporan			50,000		50,000		50,000,000
		056 Peningkatan Kapasitas			412,460	300,000	112,460		412,460,000
	002	Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	75	Persen	8,600,000	1,300,000	7,300,000	75	8,600,000,000
		051 Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup			6,900,000	1,000,000	5,900,000		6,900,000,000
		052 Penyusunan NSPK			200,000		200,000		200,000,000
		053 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan			340,000		340,000		340,000,000
		054 Peningkatan Kapasitas			660,000	300,000	360,000		660,000,000
		055 Penguatan Tugas dan Fungsi PSLH			500,000		500,000		500,000,000

D. MATRIKS TARGET, ANGGARAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

NO	KODE	KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET ESELON I	Sat	Base line	PAGU 2018	PNBP	RM	DIREKTORAT PPSA	
									Target	Anggaran
3	5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				40,272,600	7,200,000	33,072,600		18,894,524,000
	001	Pengaduan yang masuk tertangani	100	%	1000	13,522,600	2,950,000	10,572,600	35	4,644,524,000
	051	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan				6,026,814	1,750,000	4,276,814		2,203,617,000
	052	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla				5,450,000	1,000,000	4,450,000		1,690,907,000
	053	Pengembangan Sistem Pengaduan				1,045,786	200,000	845,786		250,000,000
	054	Penguatan Tugas dan Fungsi PPSA				1,000,000		1,000,000		500,000,000
	002	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan	100	%	500 izin	13,750,000	2,750,000	11,000,000	30	4,350,000,000
	051	Pengawasan Karhutla				2,557,375	500,000	2,057,375		1,050,000,000
	052	Pengawasan Penaatan Peraturan Pengendalian Ekosistem Gambut				3,535,325	750,000	2,785,325		1,225,000,000
	053	Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor Industri, Prasarana dan Jasa dan Sektor SDA				5,986,300	1,000,000	4,986,300		404,000,000
	054	Pengawasan Perizinan Lapis Kedua				1,671,000	500,000	1,171,000		1,671,000,000
	003	Penerapan sanksi administrasi	70	%		6,000,000	1,000,000	5,000,000	70	6,000,000,000
	051	Pengenaan Sanksi Administrasi				5,500,000	1,000,000	4,500,000		5,500,000,000
	052	Penegakan Hukum Administrasi Lapis Kedua				500,000	-	500,000		500,000,000
	053	Pembuatan Aplikasi Penerapan Sanksi Administrasi On-Line						-		-
	004	Sarpras dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar minimum	300	Or g		7,000,000	500,000	6,500,000	260	3,900,000,000
	051	Penyediaan Sarpras PPLH				4,000,000		4,000,000		1,400,000,000
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PPLH				1,000,000		1,000,000		500,000,000
	053	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi PPLH				2,000,000	500,000	1,500,000		2,000,000,000

**E. MATRIKS TARGET, ANGGARAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

NO	KODE	KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET ESELON I	Sat	Base line	PAGU ANGGARAN 2018	PNBP	RM	DIREKTORAT PHP LHK	
									Target	Anggaran
4	5431	PHP LHK				78,002,800	14,000,000	64,002,800		20,026,130,000
	001	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	75	%	100 kasus	65,194,830	11,500,000	53,694,830	8	13,040,540,000
	051	Verifikasi/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK				21,305,350	3,500,000	17,805,350		4,416,650,000
	052	Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Bidang LHK				19,347,080	2,000,000	17,347,080		3,193,100,000
	053	Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK				3,826,520	500,000	3,326,520		822,810,000
	054	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK				2,174,100	500,000	1,674,100		315,750,000
	055	Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK				15,667,430	5,000,000	10,667,430		2,747,930,000
	056	Fasilitas Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK				1,874,350		1,874,350		1,044,300,000
	057	Penguatan Tugas Fungsi Penegakan Hukum Pidana LHK				1,000,000		1,000,000		500,000,000
	002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan yang memenuhi standar minimum	400	Org		12,807,970	2,500,000	10,307,970	350	6,985,590,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasaran PPNS dan Pemeliharaan				6,222,380		6,222,380		400,000,000
	052	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi PPNS				6,585,590	2,500,000	4,085,590		6,585,590,000

F. MATRIKS TARGET, ANGGARAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS UNIT LAINNYA

NO	KODE	KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET ESELON I	Sat	PAGU ANGGARAN 2018	PNBP	RM	PUSAT	
								Target	Anggaran
5	5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			138,072,381	1,000,000	137,072,381		55,952,188,000
	001	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	76	Poin	12,068,201	1,000,000	11,068,201	76	12,068,201,000
		051 Program dan Anggaran			2,255,656	100,000	2,155,656		2,255,656,000
		052 Evaluasi, Pelaporan, Data, Informasi dan Kehumasan			3,210,519	200,000	3,010,519		3,210,519,000
		053 Kemitraan dan Kerjasama Teknik			1,038,130	100,000	938,130		1,038,130,000
		054 Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Hukum			758,700	100,000	658,700		758,700,000
		055 Administrasi Kepegawaian			748,950	100,000	648,950		748,950,000
		056 Pengembangan Ortala			1,055,425	100,000	955,425		1,055,425,000
		057 Administrasi Keuangan			1,212,562	100,000	1,112,562		1,212,562,000
		058 Administrasi Perlengkapan			816,694	100,000	716,694		816,694,000
		059 Ketatausahaan dan Umum			971,565	100,000	871,565		971,565,000
	951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	1,730,000	-	1,730,000	1	1,730,000,000
		995 Pengadaan Kendaraan Bermotor			25,000		25,000		25,000,000
		996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			55,000		55,000		55,000,000
		997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			1,500,000		1,500,000		1,500,000,000
		998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan			150,000		150,000		150,000,000
	994	Layanan Perkantoran	10	Bulan	124,274,180	-	124,274,180	5	42,153,987,000
	A	Gaji dan Tunjangan			110,274,180		110,274,180		35,641,149,000
	B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			14,000,000		14,000,000		6,512,838,000

**G. MATRIKS TARGET, ANGGARAN UNIT KEGIATAN BPPH LHK WILAYAH SUMATERA**

NO	KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	BPPH SUMATERA	
		Target	Anggaran
1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan		19,165,000,000
	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	920,000	12,620,000,000
	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan		600,000,000
	Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan		250,000,000
	Operasi Pengamanan Hutan		6,720,000,000
	Operasi Peredaran Hasil Hutan		4,500,000,000
	Sosialisasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		250,000,000
	Penguatan Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		300,000,000
	Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	173	6,545,000,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan		3,825,000,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan		2,120,000,000
	Peningkatan Kapasitas POLHUT		600,000,000
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		6,253,493,000
	Pengaduan yang masuk tertangani	22	2,685,793,000
	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan		1,170,000,000
	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla		1,220,007,000
	Pengembangan Sistem Pengaduan		195,786,000
	Penguatan Tugas dan Fungsi PPSA		100,000,000
	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	20	2,617,700,000
	Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan		667,700,000
	Pengawasan Penaatan Peraturan Pengendalian Ekosistem Gambut		1,400,000,000
	Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor Industri, Prasarana dan Jasa dan Sektor SDA		550,000,000
	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar minimum	10	950,000,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPLH		850,000,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PPLH		100,000,000
4	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		12,607,870,000
	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	16	11,040,490,000
	Verifikasi/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK		3,671,130,000
	Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Bidang LHK		3,410,250,000
	Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK		600,700,000
	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK		381,900,000
	Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK		2,710,500,000
	Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK		166,010,000
	Penguatan Tugas Fungsi Penegakan Hukum Pidana LHK		100,000,000
	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan yang memenuhi standar minimum	10	1,567,380,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPNS dan Pemeliharaan		1,567,380,000
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		20,075,666,000
	Layanan Perkantoran	1	20,075,666,000
	Gaji dan Tunjangan		18,320,606,000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1,755,060,000
			58,102,029,000

H. MATRIKS TARGET, ANGGARAN UNIT KEGIATAN BPPH LHK WILAYAH JAWA, BALI dan NUSA TENGGARA

NO	KODE	KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	BPPH JABAL-NUSRA	
			Target	Anggaran
1	5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan		16,751,400,000
	5428.001	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	800,000	9,952,400,000
	051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan		452,400,000
	052	Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan		250,000,000
	053	Operasi Pengamanan Hutan		5,233,000,000
	054	Operasi Peredaraan Hasil Hutan		3,500,000,000
	055	Sosialisasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		217,000,000
	056	Penguatan Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		300,000,000
	5428.002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	140	6,799,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan	a	4,550,000,000
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan		1,700,000,000
	053	Peningkatan Kapasitas POLHUT		549,000,000
3	5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		6,094,583,000
	5430.001	Pengaduan yang masuk tertangani	17	2,262,283,000
	051	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan		1,173,197,000
	052	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla		839,086,000
	053	Pengembangan Sistem Pengaduan		150,000,000
	054	Penguatan Tugas dan Fungsi PPSA		100,000,000
	5430.002	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	22	2,882,300,000
	051	Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan		-
	052	Pengawasan Penaatan Peraturan Pengendalian Ekosistem Gambut		-
	053	Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor Industri, Prasarana dan Jasa dan Sektor SDA		2,882,300,000
	054	Pengawasan Perizinan Lapis Kedua		-
	5430.004	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar minimum	10	950,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPLH		850,000,000
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PPLH		100,000,000
4	5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		12,355,010,000
	5431.001	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	15	11,350,010,000
	051	Verifikasi/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK		3,527,650,000
	052	Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Bidang LHK		3,455,250,000
	053	Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK		600,700,000
	054	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK		381,900,000
	055	Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK		3,118,500,000
	056	Facilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK		166,010,000
	057	Penguatan Tugas Fungsi Penegakan Hukum Pidana LHK		100,000,000
	5431.002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan yang memenuhi standar minimum	10	1,005,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPNS dan Pemeliharaan		1,005,000,000
5	5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		16,531,783,000
	5427.994	Layanan Perkantoran	1	16,531,783,000
	A	Gaji dan Tunjangan		14,434,833,000
	B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2,096,950,000
				51,732,776,000



I. MATRIKS TARGET, ANGGARAN UNIT KEGIATAN BPPH LHK WILAYAH KALIMANTAN

NO	KODE	KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	BPPH KALIMAN-TAN	
			Target	Anggaran
1	5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan		15,097,238,000
	5428.001	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	880,000	10,467,238,000
	051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan		300,000,000
	052	Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan		250,000,000
	053	Operasi Pengamanan Hutan		5,867,238,000
	054	Operasi Peredaran Hasil Hutan		3,500,000,000
	055	Sosialisasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		250,000,000
	056	Penguatan Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		300,000,000
	5428.002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	143	4,630,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan		3,500,000,000
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan		650,000,000
	053	Peningkatan Kapasitas POLHUT		480,000,000
3	5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		3,910,000,000
	5430.001	Pengaduan yang masuk tertangani	10	1,660,000,000
	051	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan		710,000,000
	052	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla		700,000,000
	053	Pengembangan Sistem Pengaduan		150,000,000
	054	Penguatan Tugas dan Fungsi PPSA		100,000,000
	5430.002	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	16	2,100,000,000
	051	Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan		289,675,000
	052	Pengawasan Penataan Peraturan Pengendalian Ekosistem Gambut		910,325,000
	053	Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor Industri, Prasarana dan Jasa dan Sektor SDA		900,000,000
	5430.004	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar minimum	5	150,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPLH		50,000,000
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PPLH		100,000,000
4	5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		11,572,025,000
	5431.001	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	15	10,222,025,000
	051	Verifikasi/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK		3,199,910,000
	052	Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Bidang LHK		2,898,300,000
	053	Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK		653,905,000
	054	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK		381,900,000
	055	Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK		2,822,000,000
	056	Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK		166,010,000
	057	Penguatan Tugas Fungsi Penegakan Hukum Pidana LHK		100,000,000
	5431.002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan yang memenuhi standar minimum	10	1,350,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPNS dan Pemeliharaan		1,350,000,000
5	5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		17,662,648,000
	5427.994	Layanan Perkantoran	1	17,662,648,000
	A	Gaji dan Tunjangan		16,222,086,000
	B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1,440,562,000
				48,241,911,000



J. MATRIKS TARGET, ANGGARAN UNIT KEGIATAN BPPH LHK WILAYAH SULAWESI

NO	KODE	KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	BPPH SULAWESI	
			Target	Anggaran
1	5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan		12,219,400,000
	5428.001	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	850,000	9,674,400,000
	051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan		300,000,000
	052	Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan		250,000,000
	053	Operasi Pengamanan Hutan		5,752,400,000
	054	Operasi Peredaran Hasil Hutan		2,872,000,000
	055	Sosialisasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		200,000,000
	056	Penguatan Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		300,000,000
	5428.002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	117	2,545,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan		1,470,000,000
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan		650,000,000
	053	Peningkatan Kapasitas POLHUT		425,000,000
3	5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		3,270,000,000
	5430.001	Pengaduan yang masuk tertangani	8	1,120,000,000
	051	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan		370,000,000
	052	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhuta		500,000,000
	053	Pengembangan Sistem Pengaduan		150,000,000
	054	Penguatan Tugas dan Fungsi PPSA		100,000,000
	5430.002	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	8	1,200,000,000
	051	Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan		300,000,000
	052	Pengawasan Penataan Peraturan Pengendalian Ekosistem Gambut		-
	053	Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor Industri, Prasarana dan Jasa dan Sektor SDA		900,000,000
	5430.004	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar minimum	10	950,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPLH		850,000,000
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PPLH		100,000,000
4	5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		11,063,645,000
	5431.001	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	15	10,213,645,000
	051	Verifikasi/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK		3,600,920,000
	052	Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Bidang LHK		3,489,000,000
	053	Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK		573,315,000
	054	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK		381,900,000
	055	Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK		1,902,500,000
	056	Facilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK		166,010,000
	057	Penguatan Tugas Fungsi Penegakan Hukum Pidana LHK		100,000,000
	5431.002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan yang memenuhi standar minimum	10	850,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPNS dan Pemeliharaan		850,000,000
5	5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		15,144,534,000
	5427.994	Layanan Perkantoran	1	15,144,534,000
	A	Gaji dan Tunjangan		14,116,584,000
	B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1,027,950,000
				35,157,579,000

**H. MATRIKS TARGET, ANGGARAN UNIT KEGIATAN BPPH LHK WILAYAH MALUKU-PAPUA**

NO	KODE	KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	BPPH MALUKU PAPUA	
			Target	Anggaran
1	5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan		11,340,800,000
	5428.001	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	800,000	8,096,800,000
	051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan		250,000,000
	052	Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan		250,000,000
	053	Operasi Pengamanan Hutan		4,932,662,000
	054	Operasi Peredaran Hasil Hutan		2,164,138,000
	055	Sosialisasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		200,000,000
	056	Penguatan Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan		300,000,000
	5428.002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas POLHUT dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	100	3,244,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan		2,310,000,000
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan		400,000,000
	053	Peningkatan Kapasitas POLHUT		534,000,000
3	5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		1,850,000,000
	5430.001	Pengaduan yang masuk tertangani	8	1,150,000,000
	051	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan		400,000,000
	052	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhulla		500,000,000
	053	Pengembangan Sistem Pengaduan		150,000,000
	054	Penguatan Tugas dan Fungsi PPSA		100,000,000
	5430.002	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	4	600,000,000
	051	Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan		250,000,000
	052	Pengawasan Penataan Peraturan Pengendalian Ekosistem Gambut		-
	053	Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor Industri, Prasarana dan Jasa dan Sektor SDA		350,000,000
	5430.004	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar minimum	5	100,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPLH		-
	052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PPLH		100,000,000
4	5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		10,378,120,000
	5431.001	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	6	9,328,120,000
	051	Verifikasi/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK		2,889,090,000
	052	Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Bidang LHK		2,901,180,000
	053	Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK		575,090,000
	054	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK		330,750,000
	055	Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK		2,366,000,000
	056	Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK		166,010,000
	057	Penguatan Tugas Fungsi Penegakan Hukum Pidana LHK		100,000,000
	5431.002	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan yang memenuhi standar minimum	10	1,050,000,000
	051	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPNS dan Pemeliharaan		1,050,000,000
5	5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		12,705,562,000
	5427.994	Layanan Perkantoran	1	12,705,562,000
	A	Gaji dan Tunjangan		11,538,922,000
	B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1,166,640,000
				36,274,482,000



GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LT 4
JALAN GATOT SUBROTO, JAKARTA